

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI *e-PNBP* TERHADAP PENGELOLAAN PNBP DI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Menyelesaikan Program S1 Teknik Pertambangan*



Oleh :

Nama : RIO EKA PUTRA

BP : 2012/1207499

Konsentrasi : Pertambangan Umum
Program Studi : S1 Teknik Pertambangan
Jurusan : Teknik Pertambangan

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

**Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* terhadap
Pengelolaan PNPB di Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara KESDM**

Oleh

Nama : RIO EKA PUTRA
BP/NIM : 2012/1207499
Konsentrasi : Tambang Umum
Program Studi : S1 Teknik Pertambangan

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Dr. Murad MS. MT
NIP. 196311071989031001

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Teknik Pertambangan



Dr. Fadhilah S.Pd. M.Si
NIP. 197212132000122001

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN
TUGAS AKHIR**

**Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi SI Teknik Pertambangan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang**

**Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* terhadap Pengelolaan PNBP di
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM**

Oleh:

**Nama : RIO EKA PUTRA
BP/NIM : 2012/1207499
Konsentrasi : Tambang Umum
Program Studi : SI Teknik Pertambangan**

Tim Penguji

Nama Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Murad MS, MT

1.....


2. Dr. Fadhilah, S.Pd., M.Si

2.....


3. Yoszi Mingsi Anaperta, ST., MT

3.....




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131

Telephone: FT: (0751)7055644,445118 Fax .7055644

Homepage: <http://pertambangan.ft.unp.ac.id> E-mail : mining@ft.unp.ac.id

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Eka Putra
NIM/TM : 1207499
Program Studi : SI Teknik Pertambangan
Jurusan : Teknik Pertambangan
Fakultas : FT UNP

Dengan ini menyatakan, bahwa Tugas Akhir/Proyek Akhir saya dengan Judul :

" Analisis penggunaan Sistem Aplikasi e-PNBP Terhadap Pengelolaan
PNBP Di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara kementerian ESDM "

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain.
Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan
menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku,
baik di Institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, ..11.. Februari 2021

yang membuat pernyataan,

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Teknik Pertambangan

Dr. Fadhilah, S.Pd., M.Si.
NIP. 19721213 200012 2 001





BIODATA

I. DATA DIRI

Nama Lengkap : Rio Eka Putra
No. Buku Pokok : 2012/1207499
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Kapur/08 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Ramli Buntu Nomor 23 RT 1 RW 3
Kel. Menteng Atas Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

II. DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 53 Pakan Rabaa
Sekolah Menengah Pertama : SLTPN 3 Sungai Pagu
Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Sungai Pagu
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

III. Data Penelitian

Lokasi Penelitian : Ditjen Minerba KESDM
Waktu Penelitian : Oktober s/d November 2020
Judul Penelitian : Analisis Penggunaan Sistim Aplikasi *e-PNBP* terhadap Pengelolaan PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM
Tanggal Sidang : 29 Januari 2021

Jakarta, 29 Januari 2021

Rio Eka Putra
1207499/2012

ABSTRACT

Rio Eka Putra, 2021: “Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* terhadap Pengelolaan PNBP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM”

Increasing the optimization of state revenues remains a challenge for the Directorate General of Mineral and Coal in managing PNBP. Since the transfer of mining supervision to the central government, the challenges have become bigger and more intense. Various efforts have been made by the Directorate General of Mineral and Coal but based on the Audit Results Report (LHP) BPK RI there are still various findings related to PNBP management, including the value to be paid that does not match existing obligations, must be paid, late payments, and the implementation of regulations and regulations that are not optimal. To solve this problem, the Directorate General of Mineral and Coal has built an e-PNBP Application System which aims to simplify the calculation of PNBP obligations by payers, facilitate evaluation and verification of PNBP obligations by evaluators, and make billing payments.

The author uses a qualitative descriptive approach, where the discussion of the problem can be done by describing, describing, comparing a data or situation and describing and explaining a situation in such a way that a conclusion can be drawn. There are three data collection methods in this study, namely interviewing and observing evaluators during verification and evaluation, calculating the compulsory payment assessment index and performing the Mann Whitney test on state revenue data as a product of this system.

After analyzing the data, it can be concluded that the e-PNBP Application System has a better effect on PNBP Management at the Directorate General of Mineral and Coal with the following considerations: (a) The process of implementing verification and evaluation of PNBP revenue at the Directorate General of Mineral and Coal is easier to use the e-PNBP Application System . (b) The assessment index for compulsory payments for the e-PNBP Application System is 85.25 which means Good. (c) Based on the results of the Mann Whitney test with SPSS vesri 26 against data on fixed fees, royalties and sales of mining products (IPM), the Asymp value is Sig <0.05, which means that the *e-PNBP* application system affects the amount of non-tax state revenue at the Directorate General of Mineral and Coal. . Even so, the Directorate General of Mineral and Coal needs to develop, innovate and improve so that it is more satisfying to pay as the main user of this application. other

Keyword: PNBP Ditjen Minerba, Permasalahan PNBP, Pengelolaan PNBP, Sistem Aplikasi *e-PNBP*, Uji Mann Whitney

RINGKASAN

Rio Eka Putra, 2021: “Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* terhadap Pengelolaan PNBP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM”

Peningkatan optimalisasi penerimaan negara masih menjadi tantangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam mengelola PNBP. Sejak pengalihan pengawasan pertambangan ke pemerintah pusat, tantangan menjadi semakin besar dan meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI masih terdapat berbagai temuan terkait pengelolaan PNBP, diantaranya nilai yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan kewajiban yang ada. harus disetor, keterlambatan pembayaran, serta pelaksanaan regulasi dan regulasi yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah membangun Sistem Aplikasi *e-PNBP* yang bertujuan untuk mempermudah penghitungan kewajiban PNBP oleh pembayar, memudahkan evaluasi dan verifikasi kewajiban PNBP oleh evaluator, serta melakukan pembayaran billing.

Penulis melakukan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dimana pembahasan masalah dapat dilakukan dengan menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Ada tiga metode pengambilan data pada penelitian ini yaitu mewawancarai dan mengamati evaluator saat verifikasi dan evaluasi, menghitung indeks penilaian pembayaran wajib dan melakukan uji Mann Whitney terhadap data penerimaan negara sebagai produk dari sistem ini.

Setelah dilakukan analisa data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Aplikasi *e-PNBP* membawa pengaruh lebih baik terhadap Pengelolaan PNBP di Ditjen Minerba dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) Proses pelaksanaan verifikasi dan evaluasi penerimaan PNBP di Ditjen Minerba lebih mudah menggunakan Sistem Aplikasi *e-PNBP*. (b) Indeks penilaian wajib bayar terhadap Sistem Aplikasi *e-PNBP* adalah **85,25** yang berarti **Bagus**. (c) Berdasarkan hasil uji *Mann Whitney* dengan SPSS versi 26 terhadap data iuran tetap, royalti dan penjualan hasil tambang (PHT) diperoleh nilai *Asymp Sig* < 0,05 yang berarti Sistem Aplikasi *e-PNBP* berpengaruh terhadap jumlah penerimaan negara bukan pajak di Ditjen Minerba. Meskipun demikian Ditjen Minerba perlu melakukan pengembangan, inovasi dan peningkatan agar lebih memuaskan wajib bayar selaku pengguna utama aplikasi ini. lainnya

Keyword: PNBP Ditjen Minerba, Permasalahan PNBP, Pengelolaan PNBP, Sistem Aplikasi *e-PNBP*, Uji Mann Whitney

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan berkah yang telah dilimpahkan kepada penulis terutama nikmat sehat yang semoga selalu diberikan terutama ditengah wabah corona yang melanda dunia saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik, tak lupa sholawat beserta salam penulis hadiahkan selalu untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW selaku tauladan terbaik dan junjungan kita semua.

Penelitian ini berjudul **“Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi ePNBP terhadap pengelolaan PNPB di Ditjen Minerba KESDM”** yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu pada Program Studi Teknik Pertambangan, Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Prof Dr Soepomo Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Ada banyak yang pihak yang sangat berjasa buat penulis dalam melewati segala permasalahan yang penulis hadapai baik sebelum maupun selama proses penelitian ini berlangsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga terutama Orang Tua, Saudara, istri tercinta Fitri Roza Wiranata S.Si dan anak tersayang (Almh) Asyifatu Haihaf dan Keenan Ghazi Utsman yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan penelitian penulis yang tertunda sangat lama.
2. Ibu Hj. Fadhillah S.Pd M.Si selaku Ketua Jurusan Teknik Pertambangan dan juga Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penelitian ini. Tanpa izin dan arahan dari Ibu mungkin saya tidak akan bisa melakukan semua ini, semoga jasa ibu menjadi amal dan nilai ibadah di Sisi Allah SWT nantinya aammiinn.
3. Bapak Dr. Murad ST MT selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan arahan, masukan, koreksi, dan bimbingan kepada penulis selama penelitian ini. Tanpa itu semua sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya.

4. Ibu Yozi Mingsih Anaperta ST MT, Terimakasih atas dorongan semangat serta waktu yang ibu berikan, tidak hanya sebagai dosen penguji tapi ibu sekaligus tempat bercerita yang baik atas semua hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sekalilagi terimakasih banyak bu.
5. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara khususnya Direktorat Penerimaan Minerba teristimewa kepada Bpk Dr. Ing Tri Winarno ST MT dan Bapak Adi Cahyo Nurprasetyo serta rekan-rekan kerja di Subdit Pengawasan Penerimaan Minerba atas semangat, motivasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan semuanya.
6. Semua junior-junior yang telah membantu penulis terutama Rahul yang selalu penulis repotkan dalam segala hal, selamat atas terpilih sebagai Ketua HMTP Rahul, tetap amanah, tetap kompak dan solid semoga Teknik Pertambangan UNP makin jaya dan makin mendunia aamiinn.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis secara terbuka menerima segala masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan penelitian ini kearah yang lebih baik lagi. Banyak tantangan dan kendala yang penulis hadapi selama proses penelitian ini namun Alhamdulillah semua bisa dilewati dengan baik. Akhir kata besar harapan penulis agar penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi acuan untuk menggali pengetahuan dan menambah wawasan.

Jakarta, Desember 2020

Rio Eka Putra
1207494/2012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR.	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.	iv
BIODATA.	v
ABSTRAK.	vi
RINGKASAN.	vii
KATA PENGANTAR.	viii
DAFTAR ISI.	x
DAFTAR TABEL.	xii
DAFTAR GAMBAR.	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Identifikasi Masalah.	7
C. Batasan Masalah.	7
D. Rumusan Masalah.	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Manajemen Pengawasan Pertambangan.	10
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak.	14
C. Peraturan dan Undang-Undang PNBPNBP	18
D. Sistem Aplikasi <i>e-PNBPNBP</i>	26
E. Penelitian Sebelumnya	29
F. Kerangka Konseptual.	32

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Objek Penelitian.....	35
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknis Analisis Data.....	39
F. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
G. Diagram Alir Penelitian.....	46

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Pengelolaan PNBP di Direktorat Jenderal Minerba.....	50
C. Indeks Penilaian Wajib Bayar.....	67
D. Uji <i>Mann Whiteney</i> terhadap Data PNBP.....	72
E. Rekapitulasi Hasil Perhitungan.....	79

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Klasifikasi Indeks Penilaian Wajib Bayar	39
Tabel 2. Waktu dan Rencana Penelitian.....	44
Tabel 3. Hasil Rata-Rata Unsur Penelitian	70
Tabel 4. Data Iuran Tetap.....	72
Tabel 5. Perhitungan Rank Iuran Tetap dengan SPSS versi 26	73
Tabel 6. Nilai <i>Asyim. Sig</i> Iuran Tetap dengan SPSS versi 26	74
Tabel 7. Data Royalti	74
Tabel 8. Perhitungan Rank Royalti dengan SPSS versi 26	75
Tabel 9. Nilai <i>Asyim. Sig</i> Royalti dengan SPSS versi 26.....	76
Tabel 10. Penjualan Hasil Tambang	76
Tabel 11. Perhitungan Rank PHT dengan SPSS versi 26	77
Tabel 2. Nilai <i>Asyim. Sig</i> PHT dengan SPSS versi 26	78
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Analisa Data Penelitian.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	33
Gambar 2. Tampilan SPSS versi 26	42
Gambar 3. Kolom Varian dan Label SPSS versi 26	42
Gambar 4. Kolom Pengisian Kode.....	42
Gambar 5. Kolom Pengisian Data.....	43
Gambar 6. Kolom Analisis.....	43
Gambar 7. Kolom Pengisian Kode Saat Analisis.....	44
Gambar 8. Kolom Pemindahan Data Analisis	44
Gambar 9. Kolom Hasil Akhir Analisis	45
Gambar 10. Diagram Alir Penelitian	46
Gambar 11. Susunan Organisasi Ditjen Minerba.....	50
Gambar 12. Alur Disposisi Satu.....	52
Gambar 13 Alur Disposisi 2.....	54
Gambar 14. Tampilan Luar Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i>	60
Gambar 15. Profil Perusahaan.....	61
Gambar 16. Tampilan Perhitungan	62
Gambar 17. Menu Dokumen Persyaratan	63
Gambar 18. Data Kualitas dan Kuantitas	65

Gambar 19. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Pertama	67
Gambar 20. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Kedua	68
Gambar 21. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Ketiga.....	68
Gambar 22. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Keempat	68
Gambar 23. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Kelima.....	69
Gambar 24. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Keenam	69
Gambar 25. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Ketujuh	69
Gambar 26. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Kedelapan	70
Gambar 27. Diagram Hasil Survey Pertanyaan Kesembilan	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Format Wawancara	84
Lampiran II. Kisi-kisi Survey.	87
Lampiran III. Hasil Survey	88
Lampiran IV. Perhitungan Survey	92
Lampiran V. Saran dan Harapan Wajib Bayar.....	97
Lampiran VI LHP BPK RI.....	100
Lampiran VII Lembar Validasi Kuisisioner	110
Lampiran VIII Surat Keterangan Penelitian.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional sebagai bentuk perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber penerimaan negara yang berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Untuk itu, warga negara baik individu maupun badan usaha mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau pungutan negara bukan pajak sebagai bentuk ketaatannya terhadap negara.

Mineral dan batubara merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam penerimaan negara. Berdasarkan data yang ada di MODI (Minerba One Data) saat ini di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tercatat 5.349 (Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) Izin Usaha Pertambangan (IUP), 67 (Enam Puluh Tujuh) PKP2B dan 31 (Tiga Puluh Satu) Kontrak Karya yang tersebar diseluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin pertambangan dilakukan oleh pemerintah daerah/kabupaten yang ada diwilayah izin usaha pertambangan setempat. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 seluruh fungsi pengawasan dan pengelolaan pertambangan sektor mineral dan batubara dialihkan ke pemerintah pusat.

Pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan merupakan elemen penting yang bertujuan agar terciptanya konsep penambangan yang *good mining practice*, selain aspek teknis dan lingkungan, pengawasan terhadap aspek non teknis seperti kewajiban perusahaan terhadap negara juga penting untuk dilakukan, agar tidak terjadi kecurangan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap negara, hal ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Menurut Muhammad Djafar Saidi & Rohana Huseng (2010:15) penerimaan negara bukan pajak telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan penerimaan negara bukan pajak masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke kas negara, penggunaan langsung PNBP, dan penerimaan negara bukan pajak dikelola di luar mekanisme APBN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Selaku fungsi *budgetary*, penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang APBN, melalui optimalisasi penerimaan negara. Selaku fungsi *regulatory*, penerimaan negara bukan pajak memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan

pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu sektor penyumbang APBN terbanyak di Indonesia, pengawasan dan pengelolaan PNBP sektor Minerba di Kementerian ESDM pada awalnya hanya berupa sub bagian pada salah satu unit di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Namun seiring tugas dan fungsi serta peraranan Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kewajiban PNBP pemegang izin di Indonesia maka atas saran KPK dan BPK dibentuklah Direktorat Penerimaan sebagai bentuk keseriusan Ditjen Minerba dalam melakukan pengelolaan PNBP. Hal ini juga dimaksudkan agar penerimaan negara sektor mineral dan batubara bisa dioptimalkan.

Peningkatan optimalisasi penerimaan negara masih menjadi tantangan bagi Ditjen Minerba dalam pengelolaan PNBP. Sejak beralihnya pengawasan pertambangan ke pemerintah pusat maka tantangannya menjadi lebih besar dan meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Ditjen Minerba namun berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian ESDM masih banyak temuan terkait pengelolaan PNBP diantaranya: (1) Tahun 2016 terdapat kurang bayar royalti dan DHPB sebesar Rp. 6.448.737.442,56 dan USD 1.644.934,52 (2) Tahun 2017 terdapat perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Perusahaan sebesar Rp12.948.854.864,88 yang belum dapat dijelaskan.

Potensi kurang pungut karena belum ada penagihan terhadap wajib bayar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar USD5,855,233.67 dan pencatatan kurang bayar PNBPN pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp181.320.726.863,50 dan USD 669.080,30. (3) Pemerintah belum memiliki sistem dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN (4) Penerapan regulasi dan peraturan yang belum terlaksana dengan tepat.

Ada banyak sekali peraturan yang berkaitan dengan kewajiban PNBPN pemegang izin yang ada diseluruh Indonesia. Apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan berbagai kendala bagi perusahaan diantaranya sulit untuk melakukan pengapalan, terhambatnya proses perpanjangan izin, serta timbulnya hutang PNBPN dengan denda majemuk. Seluruh kewajiban PNBPN terhutang apabila tidak terselesaikan dengan cepat maka pengelolaannya akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga proses penyelesaiannya akan menjadi semakin rumit dan lama.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 Pasal 26 (Ayat 1-3) PNBPN terutang dihitung oleh instansi pengelola, mitra instansi pengelola dan wajib bayar, Pada awal tahun 2020 peraturan tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBPN terutang masih menggunakan peraturan lama namun tanggal 08 Oktober 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2020 diterbitkan yang menyatakan bahwa perhitungan kewajiban PNBPN ini bersifat *self assessment* namun tetap dalam pengawasan instansi pengelola PNBPN yaitu Ditjen Minerba. *Self assesment* dimaksud adalah wajib

bayar harus melakukan perhitungan kewajiban secara mandiri, selanjutnya *billing* pembayaran hasil perhitungan tersebut dicetak melalui akun Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI).

Aplikasi SIMPONI dibentuk oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan penataan terhadap pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia termasuk Direktorat Jenderal Minerba. Aplikasi ini hanya mengakomodir pembuatan *billing* atas pembayaran kewajiban PNB yang telah dihitung oleh wajib bayar. Penggunaan aplikasi SIMPONI secara bersamaan oleh seluruh Kementerian/Lembaga seringkali menyulitkan Ditjen Minerba dalam mengidentifikasi penerimaan negara yang berasal dari sektor yang mereka kelola.

Dengan adanya beberapa permasalahan terkait SIMPONI, maka sebagai unit yang mengelola PNB Direktorat Jenderal Minerba membangun Sistem Aplikasi *e-PNB* sendiri yang bertujuan agar pengawasan kewajiban PNB jauh lebih mudah untuk dilakukan. Aplikasi ini dibentuk tidak hanya untuk membuat *billing* pembayaran tapi juga dilengkapi fitur perhitungan yang memudahkan wajib bayar dalam menentukan kewajiban yang akan dibayarkan.

Keberadaan Sistem Aplikasi *e-PNB* ini diharapkan dapat memberikan berbagai kemudahan bagi evaluator yang ada di Direktorat Jenderal Minerba dalam melakukan fungsi pengawasan pada pengelolaan PNB. Selain bisa memangkas waktu disposisi, Sistem Aplikasi *e-PNB* juga dilengkapi dengan

item penunjang seperti mesin perhitungan otomatis, *draft* dokumen lampiran yang dibutuhkan, serta *database* wajib bayar. Dengan adanya fitur tersebut sehingga evaluator yang bertugas lebih mudah melakukan pemantauan terhadap ketepatan waktu pembayaran, jumlah transaksi, kesesuaian perhitungan dengan data kualitas dan kuantitas yang dilampirkan dan aspek lainnya yang bisa meminimalisir terjadinya kurang bayar PNBPN sektor minerba.

Tidak hanya untuk evaluator, Sistem Aplikasi *e-PNBP* ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan buat wajib bayar dalam melakukan pembayaran atas kewajibannya. Dengan tersedianya item penunjang pada sistem ini wajib bayar hanya perlu menginput dan melampirkan data yang dibutuhkan. Sehingga diharapkan sistem ini bisa memberikan kontribusi dan hasil yang lebih baik terhadap penerimaan negara bukan pajak di Ditjen Minerba.

Dengan berbagai kemudahan, fungsi dan peranan Sistem Aplikasi *e-PNBP* tersebut idealnya turut berpengaruh terhadap pengelolaan PNBPN yang ada di Direktorat Jenderal Minerba, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian **“Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* terhadap Pengelolaan PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM”**

B. Identifikasi Masalah

Pokok masalah yang diidentifikasi dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah pemegang izin yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia sehingga menyulitkan Direktorat Jenderal Minerba dalam melakukan pengelolaan PNBPN secara langsung dan menyeluruh.
2. Temuan BPK RI terkait pengelolaan PNBPN di Direktorat Jenderal Minerba meskipun pelaksanaannya telah menggunakan aplikasi SIMPONI milik Kementerian Keuangan.
3. Penggunaan aplikasi SIMPONI yang belum efektif dan masih terdapat berbagai kelemahan diantaranya aplikasi ini hanya bisa digunakan sebagai fungsi bayar sehingga Ditjen Minerba tidak mengetahui hitungan pasti wajib bayar pada saat penyetoran, selain itu penggunaannya yang bercampur dengan kementerian/lembaga lain sehingga sulit untuk diidentifikasi apabila setoran tersebut tidak ada keterangan pembayaran.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terstruktur, terorganisir dan mencapai sasarannya, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah antara lain:

1. Penelitian ini membahas dan mengkaji proses dan mekanisme pengelolaan PNBPN sebelum dan sesudah penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBPN* di Direktorat Jenderal Minerba.

2. Penelitian ini mengungkap dan menjelaskan indeks penilaian wajib bayar terhadap Sistem Aplikasi *e-PNBP*.
3. Penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* terhadap penerimaan iuran tetap, royalti dan PHT jika dilakukan uji *Mann Whitney*.

D. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* untuk pengawasan penerimaan PNBP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada penelitian ini maka rumusan permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana proses pengelolaan PNBP sebelum dan sesudah penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP*?
2. Bagaimana indeks penilaian wajib bayar terhadap Sistem Aplikasi *e-PNBP*?
3. Apakah terdapat perbedaan penerimaan negara di Ditjen Minerba setelah menggunakan Sistem Aplikasi *e-PNBP* dibanding sistem pembayaran sebelumnya jika dilakukan uji *Mann Whitney* ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan gambaran secara terperinci tentang proses pelaksanaan verifikasi dan pengawasan dalam pengelolaan PNBP di Direktorat Jenderal Minerba sebelum dan setelah penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP*.
2. Mendapatkan indeks penilaian wajib bayar selaku pengguna terhadap Sistem Aplikasi *e-PNBP*.

3. Mendapatkan pengaruh penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* terhadap data penerimaan negara jika dilakukan uji *Mann Whitney*.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Minerba KESDM

Untuk mengetahui apakah Sistem Aplikasi *e-PNBP* cukup efektif, efisien dan akurat dalam melakukan pengelolaan PNBP di Direktorat Jenderal Minerba.

2. Bagi Pemegang Izin

Memberikan informasi kepada wajib bayar kelebihan dan kemudahan Sistem Aplikasi *e-PNBP* bagi pemegang izin dalam memenuhi kewajiban PNBP terhadap negara.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi bahwa pengawasan terhadap pertambangan khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KSDM tidak hanya aspek teknis dan lingkungan, namun juga pengawasan terhadap kewajiban PNBP sesuai dengan undang-undang dan peraturan juga penting untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Aplikasi *e-PNBP* membawa pengaruh lebih baik terhadap Pengelolaan PNBP di Ditjen Minerba dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan verifikasi dan evaluasi penerimaan PNBP di Ditjen Minerba lebih mudah menggunakan Sistem Aplikasi *e-PNBP*.
2. Indeks penilaian wajib bayar terhadap Sistem Aplikasi *e-PNBP* adalah **85,25** yang berarti **Bagus**.
3. Berdasarkan hasil uji *Mann Whiteney* dengan SPSS versi 26 terhadap data iuran tetap, royalti dan penjualan hasil tambang (PHT) diperoleh nilai *Asymp Sig* < 0,05 yang berarti Sistem Aplikasi *e-PNBP* berpengaruh terhadap jumlah penerimaan negara bukan pajak di Ditjen Minerba.

B. Saran

Meskipun Sistem Aplikasi *e-PNBP* membawa pengaruh lebih baik terhadap pengelolaan PNBP di Ditjen Minerba namun perlu pengembangan, inovasi dan peningkatan agar lebih memuaskan wajib bayar selaku pengguna utama aplikasi ini. Selain itu Sistem Aplikasi *e-PNBP* baru mengakomodir iuran tetap, royalti dan PHT untuk penambangan batubara dan mineral logam sehingga kedepannya perlu pengembangan untuk komoditas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Choliq.2011.*Pengantar Manajemen*.Yogjakarta: Mitra Cendikia
- Anonim. 2014. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi Universitas Negeri Padang*. Padang:UNP Press
- Irwandy Arif. 2003. *Manajemen Tambang Departemen Teknik Pertambangan ITB*. ITB. Bandung
- Ditjen Minerba. 2018.*Sistem Aplikasi e-PNBP*
- Effendi, Usman.2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hanan Nugroho Ministry of Development Planning/BAPPENAS berjudul : *Coal As The National Energy Supplier Forward : What Are Policies to be Prepared? Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Dev. Planning Vol. 1 No. 1 Apr 2017*
- Hasibuan, S.P Melayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jogiyanto. 2013. *Analisis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktik Aplikasi Bisnis*.Andi Offset. Yogyakarta
- Kemenkeu. 2011. *Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Marshall B Romney & Paull John Steinbart, terjemahan Kikin Sakinah Nursafira dan Novita Puspari, 2015, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- M. Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pemimin Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang *Jenis dan Tarif PNBP*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan PNBP*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP*.
- Rhifeny Ernayani, Butet Wulan Trifina & Theresia Wahyuni *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang PNBP dan Cara Bayar PNBP terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar Pada Perusahaan Tambang* Jurnal Sains Terapan No.1 Vol. 2 ISSN 2406-8810